

## REGULASI PEMERINTAH SURAKARTA TERHADAP UMKM DALAM MEMENUHI TANGGUNG JAWAB UNTUK MENINGKATKAN KAPITA NEGARA

**Muhammad Zidan<sup>1</sup>, Meliana<sup>2</sup>, Sesa Isna Dafila<sup>3</sup>**

S1 Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 20, Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta 57135

(0271) 7470550<sup>1</sup>

240416036@mhs.udb.ac.id

### Abstrak

*Studi ini menganalisis peran regulasi pemerintah di Surakarta dalam memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan kontributor kapasitas modal nasional. Menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengkaji kerangka hukum, program pemerintah daerah, dan data statistik terkait UMKM di Surakarta. Temuan menunjukkan bahwa peraturan daerah, seperti penyederhanaan perizinan melalui sistem OSS, dukungan pembiayaan melalui program KUR, dan pelatihan kewirausahaan, telah secara signifikan meningkatkan jumlah UMKM formal sebesar 18% dan meningkatkan kontribusi pajak daerah dari UMKM sebesar 12% pada tahun 2024. Peningkatan ini berdampak langsung pada produktivitas, rata-rata omzet usaha, dan pendapatan per kapita di Surakarta. Namun, tantangan masih ada, termasuk literasi keuangan yang terbatas, keterampilan digital yang kurang memadai, dan akses teknologi yang terbatas di kalangan pelaku UMKM. Untuk mengatasi masalah ini, direkomendasikan adanya evaluasi regulasi yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas berbasis komunitas, transformasi digital, dan penguatan kelembagaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti bahwa regulasi daerah yang progresif, jika diimplementasikan secara efektif, dapat memperkuat peran UMKM dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.*

*Kata Kunci: UMKM, Surakarta, pertumbuhan ekonomi, digitalisasi, pembangunan daerah..*

### Abstract

*This study analyzes the role of government regulations in Surakarta in strengthening Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as a driver of regional economic growth and contributor to national capital capacity. Using a library research approach, the study examines legal frameworks, local government programs, and statistical data related to MSMEs in Surakarta. The findings show that local regulations, such as the simplification of licensing through the OSS system, financing support via the KUR program, and entrepreneurship training, have significantly increased the number of formal MSMEs by 18% and enhanced regional tax contributions from MSMEs by 12% in 2024. These improvements directly impacted productivity, average business turnover, and per capita income in Surakarta. However, challenges remain, including limited financial literacy, insufficient digital skills, and restricted access to technology among MSME actors. To address these issues, continuous regulatory evaluation, community-based capacity building, digital transformation, and institutional strengthening are recommended. Overall, the research highlights that progressive local regulations, when effectively implemented, can strengthen MSMEs' role in inclusive and sustainable economic development.*

*Keywords: MSMEs, Surakarta, economic growth, digitalization, regional development*

### 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria skala usaha mikro, kecil, dan menengah

berdasarkan modal bersih, omzet tahunan, dan karakteristik usaha lainnya (Ambarani, 2019). Pemerintah Kota Surakarta memainkan peran krusial dalam struktur ekonomi nasional dan regional karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, mendistribusikan pendapatan secara lebih merata, dan berfungsi sebagai basis produksi yang fleksibel untuk aktivitas ekonomi lokal, sekaligus mengelola, mengarahkan, dan mengembangkan sektor UMKM melalui berbagai kebijakan, program, dan peraturan. Kejelasan regulasi, akses ke pembiayaan, kemudahan proses perizinan, dan pelatihan keterampilan, didukung oleh promosi, merupakan unsur kunci dalam mendorong pertumbuhan UMKM (Ramadani *dkk.*, 2025). Dengan kebijakan yang tepat dan terarah, UMKM dapat meningkatkan efisiensi dan daya saingnya, sehingga berkontribusi lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rohmah *dkk.*, 2025).

Kontribusi UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat regional menjadikan sektor ini komponen vital dalam upaya meningkatkan kapasitas modal nasional, khususnya melalui perluasan basis usaha dan produktivitas (Winarno, *dkk.*, 2022). Studi terbaru menegaskan bahwa penguatan UMKM melalui peningkatan kapasitas manajerial, literasi keuangan, dan digitalisasi memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan regional dan kontribusi fiskal. UMKM telah lama diakui sebagai fondasi utama ekonomi Indonesia, dengan kontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong keadilan ekonomi.

Pemahaman mendalam tentang peran UMKM dalam mendukung aktivitas ekonomi menjadi dasar penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna mengoptimalkan potensi sektor ini. Dengan memahami fungsi strategis UMKM, diharapkan berbagai tantangan dapat diidentifikasi, dan solusi yang tepat dapat dirumuskan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output per kapita suatu negara dalam jangka panjang untuk memproduksi barang dan jasa seiring waktu. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang unsur-unsur spesifik yang mempengaruhi peningkatan output dalam jangka menengah dan panjang. Pertumbuhan ekonomi juga erat kaitannya dengan peningkatan standar hidup. Ketika ekonomi tumbuh, biasanya disertai dengan peningkatan pendapatan per kapita, artinya masyarakat memiliki lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini sering berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan (Todaro & Smith, 2015).

Kontribusi UMKM terhadap pendapatan per kapita tidak terlepas dari peran Pemerintah Surakarta dalam merumuskan peraturan yang mendukung UMKM. Artikel ini akan membahas bagaimana peraturan pemerintah tersebut dapat mempengaruhi kontribusi UMKM terhadap pendapatan per kapita nasional.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan sebagai pendekatan utama untuk mengeksplorasi dan menganalisis data. Penelitian perpustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengevaluasi berbagai sumber tertulis yang terkait dengan topik penelitian, seperti e-book, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya.

Dalam penelitian ini, penelitian perpustakaan digunakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi berbagai elemen UMKM, Surakarta, pertumbuhan ekonomi, digitalisasi, dan pengembangan regional. Semua sumber yang digunakan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang peran masing-masing komponen biaya dan kontribusinya dalam mendukung efisiensi operasional perusahaan industri, terutama yang beroperasi pada skala kecil dan menengah.

Melalui pendekatan ini, para peneliti bertujuan untuk memberikan penjelasan teoretis dan konseptual yang kuat yang dapat dijadikan acuan untuk pengelolaan biaya produksi yang lebih efisien di sektor bisnis. Metode ini juga memungkinkan para peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya yang telah diverifikasi secara ilmiah.

## 3. HASIL DAN DISKUSI

Pemerintah Kota Surakarta menunjukkan pendekatan yang cukup progresif dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung UMKM.

Berdasarkan observasi dan analisis dokumen kebijakan regional, pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan seperti penyederhanaan perizinan melalui sistem OSS, fasilitasi pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi bisnis. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM menjadi landasan hukum utama dalam implementasi program-program tersebut. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dengan lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat lokal semakin memperkuat ekosistem UMKM di wilayah ini.

Dampak peraturan ini terhadap peningkatan kapasitas modal nasional dapat dilihat melalui beberapa indikator ekonomi lokal. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta pada tahun 2024, terdapat peningkatan sebesar 18% dalam jumlah UMKM formal dibandingkan tahun sebelumnya, serta peningkatan sebesar 12% dalam kontribusi pajak daerah dari sektor UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang mendukung formalitas usaha dan akses pembiayaan mampu mendorong pelaku UMKM untuk berkontribusi lebih signifikan terhadap pendapatan regional. Peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha juga tercermin dalam pertumbuhan rata-rata omzet UMKM yang mendapat bantuan pemerintah, yang secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Surakarta.

Namun, implementasi peraturan ini tidak tanpa tantangan. Beberapa pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam memahami proses perizinan digital, literasi keuangan yang terbatas, dan akses teknologi yang terbatas. Di sisi lain, peluang signifikan terbuka melalui pembangunan kapasitas institusional, pemanfaatan teknologi digital, dan integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri kreatif dan pariwisata lokal. Pemerintah Surakarta memiliki potensi untuk mengembangkan model pemberdayaan berbasis komunitas dan inkubasi bisnis yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha mikro. Dengan evaluasi regulasi yang berkelanjutan dan partisipasi aktif dari pelaku UMKM, kebijakan regional dapat menjadi alat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian mengenai peraturan Pemerintah Kota Surakarta terkait UMKM menunjukkan bahwa kebijakan lokal cukup progresif dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha kecil. Peraturan seperti penyederhanaan perizinan melalui OSS, fasilitasi pembiayaan melalui KUR, dan pelatihan digitalisasi usaha telah terbukti meningkatkan formalitas UMKM (naik 18% pada 2024) serta kontribusi pajak regional dari UMKM (naik 12%). Hal ini telah berdampak langsung pada peningkatan produktivitas, omzet, dan pendapatan per kapita masyarakat Surakarta. Namun, masih terdapat hambatan, seperti keterbatasan literasi keuangan, pemahaman tentang perizinan digital, dan akses terhadap teknologi.

Pemerintah Kota Surakarta perlu memperkuat regulasi UMKM dengan meningkatkan literasi digital dan keuangan melalui perluasan program pelatihan praktis dan pembinaan berbasis komunitas agar pelaku usaha lebih siap memanfaatkan sistem lisensi digital, platform pemasaran online, dan manajemen keuangan. Selain itu, regulasi regional, termasuk mekanisme OSS, perlu disederhanakan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan akses yang benar-benar mudah bagi usaha mikro. Pengembangan pusat inkubasi usaha berbasis sektor unggulan seperti kuliner, kerajinan, dan pariwisata menjadi penting untuk mendorong UMKM untuk berkembang dan masuk ke rantai pasok industri. Dukungan akses teknologi juga perlu diperkuat melalui subsidi atau kolaborasi dengan perusahaan teknologi dalam penyediaan aplikasi manajemen usaha, perangkat digital, dan infrastruktur yang terjangkau. Akhirnya, penguatan institusional UMKM perlu dilakukan dengan melibatkan universitas, koperasi, dan komunitas lokal secara sistematis dalam pemantauan, pelatihan, dan advokasi kebijakan.

Penelitian masa depan disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei untuk mengukur langsung dampak regulasi terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi fiskal. Perbandingan antarwilayah juga diperlukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam kebijakan UMKM di berbagai kota. Selain itu, studi khusus mengenai digitalisasi UMKM sangat penting untuk menilai sejauh mana integrasi teknologi seperti e-commerce, fintech, dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan daya saing bisnis. Studi longitudinal dengan cakupan jangka panjang dapat memberikan gambaran tentang keberlanjutan dampak regulasi terhadap pertumbuhan UMKM. Di sisi lain, penelitian berbasis gender dan inklusi sosial juga perlu dikembangkan untuk menilai apakah regulasi UMKM di

Surakarta cukup mendukung kelompok rentan, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ambarani, R. (2019). Analisis Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 120, 45-58.
- Ambarini, N. S. B. (2019). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2008 DALAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BERKELANJUTAN. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 26(2), 32–50. <https://doi.org/10.33369/jsh.26.2.32-50>  
[https://brida.surakarta.go.id/e-riset/uploads/riset//Kajian\\_Digitalisasi\\_IKM\\_UMKM.pdf](https://brida.surakarta.go.id/e-riset/uploads/riset//Kajian_Digitalisasi_IKM_UMKM.pdf)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Profil UMKM Indonesia. <https://www.kemenkopukm.go.id>
- OECD. (2023). SME and Entrepreneurship Outlook 2023. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/sme>
- Ramadani, A., Sari, N., & Prasetyo, D. (2025). Efektivitas Regulasi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Kreatif*, 30, 88-97.
- Ramadani, S., Ramadhani, D. A., Ikrom, M., & Harahap, L. M. (2025). Peran strategis UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN)*, 4(1), 158–166.
- Rohmah, W., Ramadhani, M., & Ragiliawan, Z. (2025). Efektivitas Kebijakan Perizinan Usaha di Kota Surakarta: Analisis Hukum Administrasi dan Pemerintahan. *Jurnal Bisnis dan Sosial*, 3(1).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. Pearson.
- Winarno, B., Riyadi, A., & Pratio, G. A. (2022). Penyusunan Kajian Kontribusi UMKM terhadap PDRB, Tenaga Kerja dan Ekspor Kota Surakarta. *Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta*, 1(1), 102–114.
- Winarno, T., Riyadi, S., & Pratio, M. (2022). UMKM dan Peningkatan Kapita Negara: Kajian Ekonomi Makro. *Jurnal Kebijakan Publik*, 100, 112-125.